

**DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
(PPRG) TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Dasar Hukum:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 berpedoman dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Ada 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan di Sekretariat Daerah sebagaimana disampaikan pada tabel 1, sedangkan untuk ARG direncanakan sejumlah 20 (dua puluh) subkegiatan.

**Tabel 1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
1.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
1.3	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bagian Umum
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1.4.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
1.5	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum
1.6	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.7	<i>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
1.8	<i>Kegiatan Penataan Organisasi</i>	
1.8.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
1.8.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	
1.8.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	
1.9	<i>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1.9.1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	
1.9.2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
1.9.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
II.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.1	<i>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	Bagian Tata Pemerintahan
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintah	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		
2.2	<i>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>		
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja sama Dalam Negeri		
2.2.2	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		
2.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
2.3	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Bagian Kesra	
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
2.3.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		
2.3.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
2.4	<i>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Bagian Hukum	
2.4.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		
2.4.2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum		
2.4.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
III.	Program Perekonomian dan Pembangunan		
3.1	<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>		Bagian Perekonomian
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD		
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
3.2	<i>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>		
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANA
3.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
3.3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
3.3.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
3.3.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
3.4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
3.4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
3.4.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8.531.400,00
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 200.883.848,00
3	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 681.507.500,00
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.350.000,00
5	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 474.695.100,00
6	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 478.300.800,00
7	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Rp 181.086.450,00
8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 148.479.000,00
9	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 212.854.400,00
10	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 215.612.899,00
11	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 1.614.886.428,00
12	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 5.210.000.000,00
13	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 237.312.000,00
14	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 84.000.000,00
15	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 28.127.000,00
16	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 303.149.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN
17	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 460.601.400,00
18	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 262.189.040,00
19	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 242.491.032,00
20	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 389.208.968,00
Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)				Rp 11.454.266.765,00
Jumlah Anggaran Belanja (dikurangi Gaji)				Rp 30.763.066.161,00
Persentase ARG				37,23%

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

I. Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
5.	<p>1</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Menyusun dokumen perijinan kinerja, RENJA, RENSTRA, LKJIP, SAKIP, DPA, DPPA, RKA RKA-P dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku</p> <p>6. Sasaran Sub Kegiatan: Perangkat Daerah</p>	<p>2</p> <p>2. Dokumen yang disusun merupakan data dari 10 Bagian di Sekretariat Daerah</p> <p>3. Jumlah dokumen Perencanaan responsif gender Sekretariat Daerah 10 Sub Kegiatan dari 48 Sub Kegiatan atau masih 20,83%</p> <p>4. Anggaran responsif gender Rp 8.784.451.503 dari total pagu anggaran non Gaji Rp 32.871.822.680 atau 26,72%</p>	3	4	5	6	7	8	9
6.	<p>Sasaran Sub Kegiatan: Perangkat Daerah</p>								<p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Membuat Surat Permintaan Penyusunan dokumen Gender Analysis Path Way (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) di Lingkup Sekretariat Daerah
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Tersusunnya 20 dokumen Gender Analysis Path Way (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) di Lingkup Sekretariat Daerah</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Keuangan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	<p>a. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026</p> <p>b. Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>
2. GAMBARAN UMUM	<p>Dokumen yang disusun merupakan data dari 10 Bagian di Sekretariat Daerah</p> <p>Jumlah dokumen Perencanaan responsif gender Sekretariat Daerah 10 Sub Kegiatan dari 48 Sub Kegiatan atau masih 20,83%</p> <p>Anggaran responsif gender Rp 8.784.451.503 dari total pagu anggaran non Gaji Rp 32.871.822.680 atau 26,72%</p> <p>Akses: Masih minimnya dokumen perencanaan yang responsif gender</p> <p>Partisipasi: Pembantu perencana bagian belum memahami pentingnya perencanaan yang responsif gender</p>

	<p>Manfaat: Belum semua merasakan manfaat dari perencanaan yang responsif gender</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Belum optimalnya sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender kepada Pembantu Perencana Bagian di Sekretariat Daerah</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Belum ada Peraturan Bupati atau Surat Edaran terkait penyusunan dokumen Perencanaan yang responsif gender yang disampaikan sebelum penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Perangkat Daerah
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan IV
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 8.531.400,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
No. Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Prioritas Dalam RPJMD/ RKPDP 2025: Penguatan Kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</p> <p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Memfasilitasi tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Akhir Tahun</p>	<p>1. Dasar Hukum: - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender - Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Blitar 2021-2026 - Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Akses: Tidak semua Pembantu Perencana Bagian belum mendapatkan pengetahuan pentingnya perencanaan yang responsif gender</p> <p>Partisipasi: Pembantu Perencana Bagian belum memahami pentingnya perencanaan yang responsif gender</p>	<p>1. Kurangnya pemahaman Pembantu Perencana Bagian di Sekretariat Daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan yang responsif gender</p> <p>2. Latar belakang pendidikan Bendahara yang tidak linear dengan bidang keuangan</p>	<p>1. Belum ada pedoman atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen PPRG</p> <p>2. Adanya peraturan yang mewajibkan disusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas sumber daya Pembantu Perencana Bagian di Sekretariat Daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan yang responsif gender</p> <p>2. Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>a. Merencanakan anggaran narasumber untuk mendampingi proses penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>b. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam penyusunan dokumen Perencanaan yang responsif gender</p> <p>c. Memfasilitasi Bendahara untuk mengikuti Bimbingan Teknis bagi Bendahara Bimbingan Teknis Penyusunan</p>	<p>1.20 Dokumen perencanaan responsif gender</p> <p>2. 40% Anggaran responsif gender dari total pagu anggaran Tahun 2025</p> <p>3. Rekonsiliasi dilaksanakan di Semester I</p> <p>4. Penyusunan bahan Laporan Keuangan maksimal bulan Maret n+1</p>	<p>1. Indikator Aktifitas: a. Tersedianya anggaran narasumber untuk mendampingi proses penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>b. Tersusunnya dokumen PPRG Sekretariat Daerah</p> <p>c. Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota untuk transportasi Bedahara Rekonsiliasi Semesteran</p>

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3-5			Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan	Langkah 7 Rencana Aksi	Langkah 8 Database (Base-line)	Langkah 9 Indikator Kinerja
			Langkah 3 Faktor Kesenjangan	Langkah 4 Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Langkah 5 Sebab Kesenjangan Eksternal				
6.	Sasaran Sub Kegiatan: Perangkat Daerah	<p>2. Jumlah dokumen Perencanaan responsif gender Sekretariat Daerah 10 Sub Kegiatan dari 48 Sub Kegiatan atau masih 20,83%</p> <p>3. Anggaran responsif gender Rp 8.784.451.503 dari total pagu anggaran non Gaji Rp 32.871.822.680 atau 26,72%</p> <p>4. Rekonsiliasi Keuangan setiap bulan</p> <p>5. Laporan Keuangan Semester I setelah Semester I</p> <p>6. Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun paling lambat 3 bulan n+1</p>	3	4	5	6	7	8	9
			Laporan Keuangan	d. Merencanakan anggaran Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota untuk transportasi Bendahara mengikuti Rekonsiliasi Semesteran				d. Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kota) untuk memfasilitasi Bendahara mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	
									<p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang terselesaikan</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian</p>

No. Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
1		2	3	4	5	6	7	8	9
									kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan anggaran Narasumber untuk mendampingi proses penyusunan dokumen perencanaan b. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam penyusunan dokumen Perencanaan yang responsif gender c. Merencanakan anggaran Perjalanan Dinas Bisa (Luar Kota) untuk memfasilitasi Bendahara mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan d. Merencanakan anggaran Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota untuk transportasi Bedanhara Rekonsiliasi Semesteran
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya anggaran narasumber untuk mendampingi proses penyusunan dokumen perencanaan b. Tersusunnya dokumen PPRG Sekretariat Daerah c. Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota untuk transportasi Bendahara Rekonsiliasi Semester a. Tersedianya anggaran Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kota) untuk memfasilitasi Bendahara mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang terselesaikan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ul style="list-style-type: none"> a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender b. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah c. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 d. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

	d. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. GAMBARAN UMUM	<p>Jumlah dokumen Perencanaan responsif gender Sekretariat Daerah 10 Sub Kegiatan dari 48 Sub Kegiatan atau masih 20,83%</p> <p>Anggaran responsif gender Rp 8.784.451.503 dari total pagu anggaran non Gaji Rp 32.871.822.680 atau 26,72%</p> <p>Rekonsiliasi Keuangan setiap bulan Laporan Keuangan Semester I setelah Semester I Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun paling lambat 3 bulan n+1</p> <p>Akses: Tidak semua Pembantu Perencana Bagian belum mendapatkan pengetahuan pentingnya perencanaan yang responsif gender</p> <p>Partisipasi: Pembantu Perencana Bagian belum memahami pentingnya perencanaan yang responsif gender</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: 1. Kurangnya pemahaman Pembantu Perencana Bagian di Sekretariat Daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan yang responsif gender 2. Latar belakang pendidikan Bendahara yang tidak linear dengan bidang keuangan</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: 1. Belum ada pedoman atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen PPRG 2. Adanya Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Perangkat Daerah
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan III dan Triwulan IV
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 200.883.848,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
6.	1 Sasaran Sub Kegiatan: Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemerintah Daerah	2 2. Pengguna aktif gedung kantor: - Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Daerah se-Kab. Blitar dengan perincian Laki-laki: 67 orang dan Perempuan: 9 orang. - Jumlah semua karyawan (pejabat eselon IV, staf ASN dan THL) Setda: 173 orang ,dengan rincian: Laki-laki: 90 orang, Perempuan: 68 orang. Dari jumlah Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan karyawan Setda tersebut yang berusia: >50 : 73 orang, <50 : 161 orang.	3 Kontrol: - Kurangnya perencanaan dalam mengalokasikan anggaran yang responsif gender. - Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Manfaat: Penggunaan fasilitas gedung kantor masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kaum disabilitas dan lansia.	4 - Belum tersedianya <i>smoking area</i> . - Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas gedung kantor dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja.	5	6	7	8 perempuan, lansia dan disabilitas.	9 3. Indikator Kegiatan: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik. 4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Indikator Sasaran Peringkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, anak-anak dan lansia yang datang ke kantor Setda. Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 1.139 orang, Perempuan: 1.216 orang, Lansia: 3 orang, Disabilitas: 2 orang.							Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor: a. Pemeliharaan Gedung Kantor Setda b. Pemeliharaan Pendopo SAP (Sasana Adhi Praja) c. Pemeliharaan Lift Kantor Setda
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: a. Terpeliharanya Gedung Kantor Setda b. Terpeliharanya Pendopo SAP (Sasana Adhi Praja) c. Terpeliharanya Lift Kantor Setda</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung b. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Blitar 2021-2026 c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
2. GAMBARAN UMUM	Pengguna aktif gedung kantor: - Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Daerah se-Kab. Blitar dengan perincian Laki-laki: 67 orang dan Perempuan: 9 orang. - Jumlah semua karyawan (pejabat eselon IV, staf ASN dan THL) Setda: 173 orang ,dengan rincian: Laki-laki: 90 orang, Perempuan: 68 orang. Dari jumlah Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan karyawan Setda tersebut yang berusia: >50 : 73 orang, <50 : 161 orang.

	<p>Kunjungan tamu dan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, anak-anak dan lansia yang datang ke kantor Setda.</p> <p>Jumlah kunjungan ke kantor Sekda: Laki-laki: 1.139 orang, Perempuan: 1.216 orang, Lansia: 3 orang, Disabilitas: 2 orang</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan awal pembangunan gedung belum mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan pegawai laki-laki dan perempuan. - Gedung kantor belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat daerah, karyawan dan masyarakat. <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia belum dapat memanfaatkan gedung kantor. <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya perencanaan dalam mengalokasikan anggaran yang responsif gender. - Terbatasnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. <p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan fasilitas gedung kantor masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kaum disabilitas dan lansia. <p>Sebab Kesenjangan Internal:</p> <p>Pengelolaan kegiatan belum responsif gender terhadap kebutuhan fasilitas kerja yang layak bagi karyawan laki-laki dan perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat toilet gedung kantor yang mempunyai 1 pintu utama, meskipun sudah terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. - Fasilitas tempat ibadah yang belum memenuhi standar kebutuhan laki-laki dan perempuan. - Belum tersedianya smoking area. - Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas gedung kantor dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. <p>Sebab Kesenjangan Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya aturan dari pusat yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan responsif gender kantor. - Pengalokasian penambahan ruangan responsif gender belum ada - Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap keterkaitan tugas dan fungsinya dengan program yang responsif gender.
B. PENERIMA MANFAAT	: Pejabat Daerah, ASN dan Masyarakat

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Pengadaan Langsung
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan II, III
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 681.507.500,00

Blitar, 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



yzm
Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
No. Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Prioritas Dalam RPJMD/ RKPD 2025: Penguatan Kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</p> <p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Tersedianya Jasa Surat Menyurat</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan: Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah</p>	<p>1. Dasar Hukum: - Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas - Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026</p> <p>- Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p> <p>- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun</p>	<p>Akses: - Tenaga Caraka didominasi oleh laki-laki - Tenaga administrasi yang aktif menggunakan aplikasi persuratan masih didominasi perempuan.</p> <p>Partisipasi: Keterlibatan laki-laki dalam pengoperasian aplikasi persuratan sangat terbatas.</p> <p>Kontrol: Masih minimnya pengisian survei kepuasan masyarakat</p>	<p>1. Masih kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dalam pelayanan surat menyurat bagi kaum difabel/penyandang disabilitas.</p> <p>2. Persepsi bahwa laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan bersifat teknis bekerja di lapangan mendistribusikan surat ke perangkat daerah dan instansi lainnya sedangkan perempuan</p>	<p>1. Belum ada pedoman baku mengenai komunikasi yang baik dalam pelayanan surat menyurat.</p> <p>2. Loket surat masuk dan permohonan nomor yang meningkat jika saat server/jaringan internet down belum terpisah berdsarkan gender.</p>	<p>Terwujudnya kelancaran dan efektivitas administrasi perkantoran</p>	<p>a. Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Caraka)</p> <p>b. Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)</p> <p>c. Penyediaan Belanja Paket/ Pengiriman/ Surat</p>	<p>1. Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Caraka)</p> <p>2. Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)</p> <p>3. Penyediaan Belanja Paket/ Pengiriman/ Surat</p>	<p>1. Indikator Aktifitas: a. Tersedia cukup Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Caraka)</p> <p>b. Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)</p> <p>c. Tersedianya Belanja Paket/ Pengiriman/ Surat</p> <p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
No. Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4		Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal				
1	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <p>2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Penyediaan jasa surat menyurat berupa penyelenggaraan aktivitas pengelolaan administrasi perkantoran dan proses penanganan surat masuk dan surat keluar.</p> <p>3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2 Laporan (Surat Masuk dan Surat Keluar)</p> <p>4. Pendistribusian surat ke Perangkat Daerah dan instansi lainnya dilakukan oleh Caraka (Laki-laki = 2 orang).</p>	<p>3</p> <p>Manfaat: Sarana prasarana masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh kaum disabilitas dan lansia.</p>	<p>4</p> <p>hanya mampu di bidang administrasi saja.</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat: a. Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Caraka) b. Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) c. Penyediaan Belanja Paket/Pengiriman/Surat
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: Indikator Aktifitas: a. Tersedia cukup Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Caraka) b. Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) c. Tersedianya Belanja Paket/Pengiriman/Surat Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kegiatan: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	a. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas b. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Blitar 2021-2026 c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar d. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. GAMBARAN UMUM	Penyediaan jasa surat menyurat berupa penyelenggaraan aktivitas pengelolaan administrasi perkantoran dan proses penanganan surat masuk dan surat keluar. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2 Laporan (Surat Masuk dan Surat Keluar) Pendistribusian surat ke Perangkat Daerah dan instansi lainnya dilakukan oleh Caraka (Laki-laki = 2 orang). Administrasi surat lingkup Pemkab. Blitar menggunakan aplikasi dengan 5 tenaga administrasi perempuan dan 2 tenaga administrasi laki-laki yang melekat dengan pimpinan/pejabat daerah di lingkup Sekretariat Daerah.

	<p>Manfaat: Sarana prasarana masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kaum disabilitas dan lansia.</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dalam pelayanan surat menyurat bagi kaum difabel/penyandang disabilitas. - Persepsi bahwa laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan bersifat teknis bekerja di lapangan mendistribusikan surat ke perangkat daerah dan instansi lainnya sedangkan perempuan hanya mampu di bidang administrasi saja. <p>Sebab Kesenjangan Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pedoman baku mengenai komunikasi yang baik dalam pelayanan surat menyurat. - Loker surat masuk dan permohonan nomor yang meningkat jika saat server/jaringan internet <i>down</i> belum terpisah berdsasarkan gender.
B. PENERIMA MANFAAT	: Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Pengadaan Langsung
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Januari – Desember 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 20.350.000,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
6.	Sasaran Sub Kegiatan: Puskesmas di Kabupaten Blitar	2. Jumlah ASN di Puskesmas Kabupaten Blitar sebanyak 711, dengan perbandingan 131 pegawai laki-laki dan 580 pegawai perempuan	3	4	5	6	7	8	9
									4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Indikator Sasaran Peringkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Penataan Organisasi
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan Puskesmas
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan Puskesmas yang responsif gender</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ul style="list-style-type: none"> a. Permen PAN RB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah c. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Jumlah Puskesmas di Kabupaten Blitar sebanyak 25</p> <p>Jumlah ASN di Puskesmas Kabupaten Blitar sebanyak 711, dengan perbandingan 131 pegawai laki-laki dan 580 pegawai perempuan</p> <p>Akses: Belum adanya dokumen Analisis Jabatan Puskesmas yang responsif gender</p> <p>Partisipasi: Jabatan pada Puskesmas Kabupaten Blitar belum dilakukan analisis jabatan yang responsif gender</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Jabatan pada Puskesmas di Kabupaten Blitar belum dilakukan analisis jabatan yang responsif gender</p>

B. PENERIMA MANFAAT	:	Puskesmas di Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA		
1. METODE PELAKSANAAN	:	Pengadaan Langsung
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	:	Dilaksanakan pada Triwulan I
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	:	Rp 474.695.100,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
6.	Sasaran Sub Kegiatan: Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Penerima Layanan	<p>4. Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebanyak 46 atau sebesar 5,97%</p> <p>5. Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebanyak 87 orang, dengan perbandingan sebanyak 67 perempuan dan 20 laki-laki</p>	3	4	5	6	7	8	9
									<p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Sasaran Sub Kegiatan: Puskesmas di Kabupaten Blitar	3. Jumlah ASN di Puskesmas Kabupaten Blitar sebanyak 711, dengan perbandingan 131 pegawai laki-laki dan 580 pegawai perempuan							4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Penataan Organisasi
SUB KEGIATAN	: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Tersusunnya dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang responsive gender</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <p>a. Permen PANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>b. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026</p>
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar sebanyak 770</p> <p>770 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdiri dari: 52 Perangkat Daerah dan 718 Unit Pelayanan Terpadu</p> <p>Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebanyak 46 atau sebesar 5,97%</p> <p>Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebanyak 87 orang, dengan perbandingan sebanyak 67 perempuan dan 20 laki-laki</p> <p>Partisipasi: Belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melakukan survei kepuasan masyarakat sehingga belum menyusun laporan survei kepuasan masyarakat</p> <p>Manfaat: Belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki laporan jumlah penerima layanan antara laki-laki dan perempuan</p>

	<p>Sebab Kesenjangan Internal: Belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memahami pentingnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengetahui Permen PANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengharuskan melakukan survei kepuasan masyarakat</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Penerima Layanan
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola Tipe I
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Dilaksanakan pada Triwulan III
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 478.300.800,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lingkungan Pemkab. Blitar yang menggunakan sewa <i>sound system</i>							4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
SUB KEGIATAN	: Fasilitasi Keprotokolan
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan personel baik laki-laki maupun perempuan dalam Bimtek Keprotokolan dan penugasan pendampingan baik dalam daerah maupun luar daerah 2. Sewa <i>sound system</i> dalam memperlancar dan mendukung kelancaran berlangsungnya kegiatan yang diikuti Pimpinan Daerah
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya MC laki-laki b. Tersedianya <i>sound system</i> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase Capaian Pelayanan kegiatan Fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	:
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan b. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Jumlah Personel pada Bagian Protokol dan Komunikasi 17 orang. Terdiri dari Laki-laki: 9; perempuan: 8</p> <p>Pelaksanaan kegiatan upacara 17-an dan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) serta apel pagi rutin setiap hari Senin di lingkungan Pemkab. Blitar yang menggunakan sewa <i>sound system</i></p> <p>Akses: Belum semua personel laki-laki di Bagian Prokopim mengikuti bimtek keprotokolan</p> <p>Partisipasi: Yang mempunyai keahlian untuk menjadi MC mayoritas perempuan</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Mayoritas yang memiliki kemampuan sebagai MC adalah personel perempuan</p>

		Sebab Kesenjangan Eksternal: Belum maksimalnya pelatihan MC untuk laki-laki
B. PENERIMA MANFAAT	:	Seluruh OPD se-Kab. Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA		
1. METODE PELAKSANAAN	:	Swakelola, e-Purchasing
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	:	Januari s/d Desember 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	:	Rp. 181.086.450,00

Blitar, 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH *kg*
KABUPATEN BLITAR

mon
Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
6.	<p>Sasaran Sub Kegiatan: Seluruh OPD se-Kab. Blitar dan Masyarakat</p>	<p>Laki-laki: 9; perempuan: 8</p> <p>3. Pemberian informasi PHBN melalui pemasangan Banner di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>						album	di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	<p>Pendokumentasi an dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>5. Indikator Sasaran Peringkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
SUB KEGIATAN	: Pendokumentasian Tugas Pimpinan
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pendokumentasian kegiatan pimpinan 2. Keikutsertaan Bimtek Fotografi bagi ASN Perempuan 3. Adanya Pembagian tugas personel laki-laki sebagai fotografer dan personel perempuan sebagai seting foto album 4. Cetak Banner PHBN
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terpublikasinya kegiatan pimpinan b. Tersedianya Fotografer perempuan c. Buku Album kegiatan pimpinan Daerah d. Terpasangnya banner PHBN <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase Capaian Pelayanan kegiatan Fasilitas Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	:
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Permendagri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah c. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Jumlah Personel pada Bagian Protokol dan Komunikasi 17 orang. Terdiri dari Laki-laki: 9; perempuan: 8</p> <p>Pemberian informasi PHBN melalui pemasangan Banner di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar</p>

	<p>Akses: Kurangnya Kemampuan personel Wanita di Bagian Prokopim dalam hal fotografi kurang</p> <p>Partisipasi: Yang mempunyai keahlian untuk menjadi Fotografer mayoritas laki-laki</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Kurangnya pengalaman dalam tugas fotografi di lapangan pada personel perempuan</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Terbatasnya sarana prasarana terutama Kamera DSLR</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Seluruh OPD se-Kab. Blitar dan Masyarakat
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola, e-Purchasing
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Januari s/d Desember 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp. 148.479.000,00

Blitar, 10 September 2024
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650603 199002 1 002

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
.6.	Sasaran Sub Kegiatan: Desa dan Kelurahan	2 Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. 2. Secara keseluruhan unsur nama rupabumi yang telah terdata di Kabupaten Blitar masih 1.511 unsur dari sekitar 19 ribu unsur yang ada di Kabupaten Blitar 3. Sosialisasi Pendataan Nama Rupabumi di 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar dengan mengundang semua Desa (220) dan Kelurahan (28)	3	4	5	6	7	8	9 pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan 5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Administrasi Tata Pemerintahan
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
KINERJA RESPONSIF GENDER	:
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: Melaksanakan Bimbingan Teknis Pendataan Nama Rupabumi pada unsur-unsur nama rupabumi yang ada di wilayah Desa dan Kelurahan
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi; c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; d. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
2. GAMBARAN UMUM	<p>Secara keseluruhan unsur nama rupabumi yang telah terdata di Kabupaten Blitar masih 1.511 unsur dari sekitar 19 ribu unsur yang ada di Kabupaten Blitar</p> <p>Sosialisasi Pendataan Nama Rupabumi di 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar dengan mengundang semua Desa (220) dan Kelurahan (28)</p> <p>Partisipasi: Berdasarkan data dari BIG (Badan Informasi Geospasial) masih terdapat banyak unsur rupabumi yang belum terdata pada aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) di Kabupaten Blitar</p> <p>Kontrol: Desa dan Kelurahan belum memiliki surveyor yang dapat melakukan pendataan nama rupabumi secara mandiri</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Kurang nya pemahaman sekaligus jumlah surveyor pada masing-masing Desa dan Kelurahan</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Penyelenggaraan nama rupabumi masih belum menjadi salah satu prioritas kegiatan di wilayah</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Desa dan Kelurahan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan I
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 212.854.400,00

Blitar, 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2025

No	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana ke Depan	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<p>Prioritas Dalam RPJMD/ RKPD 2025: Pengoptimalan Kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</p> <p>Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan</p> <p>Sub Kegiatan: Penataan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Menciptakan tertib administrasi pemerintahan yang sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Sasaran Sub Kegiatan: Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>1. Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; - Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; - Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.</p>	<p>Partisipasi: Kurangnya sinergi antara masing-masing Perangkat Daerah utamanya yang terdapat pada satu rumpun bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan</p>	<p>Minimnya sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan antar Perangkat Daerah</p>	<p>Masing-masing perangkat daerah hanya berfokus pada kegiatan sektoral masing-masing</p>	<p>Sinergitas dalam penyusunan Rumusan Kebijakan Program dan Kegiatan Pemerintah</p>	<p>Lokakarya Perangkat Daerah dan Bagian rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka sinergi program dan kegiatan</p>	<p>Kegiatan Lokakarya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan jumlah peserta: 30 orang Narasumber: 5 orang</p>	<p>1. Indikator Aktifitas: Perumusan Kebijakan melibatkan stakeholders terkait</p> <p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan</p> <p>4. Indikator Program: Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja</p>	

No	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub Kegiatan	Kebijakan dan Rencana ke Depan Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
	1	2 2. Fasilitasi disposisi pimpinan terkait rapat pembahasan permasalahan pemerintahan umum	3	4	5	6	7	8	9 sama daerah yang terselesaikan 5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Administrasi Tata Pemerintahan
SUB KEGIATAN	: Penataan Administrasi Pemerintahan
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Melaksanakan Lokakarya terkait Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Perumusan Kebijakan melibatkan stakeholders terkait</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan</p> <p>Indikator Program: Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; d. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
2. GAMBARAN UMUM	Fasilitasi disposisi pimpinan terkait rapat pembahasan permasalahan pemerintahan umum
B. PENERIMA MANFAAT	: Perangkat Daerah
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan III
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 215.612.899,00

Blitar, 10 September 2024
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BLITAR


Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laki-laki=46. perempuan: 54							4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Bina Mental Spiritual
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Bimbingan Teknis Pemusalaran Jenazah bagi Masyarakat Kabupaten Blitar
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Dokumen hasil fasilitasi pembinaan umat beragama</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Pengelolaan Bina Mental Spiritual</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase pelaksanaan Hasil pengolaan Pengelolaan Bina Mental Spiritual</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <p>a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>c. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026</p>
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 7 orang. Laki-laki: 3; perempuan: 4</p> <p>Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1</p> <p>Jumlah Peserta Bimtek Pemusalaran Jenazah Tahun 2024=100 orang, jumlah peserta laki-laki=46. perempuan: 54</p> <p>Akses: Selama ini di Kabupaten Blitar masih ditemukannya minimnya pengetahuan bagi kaum perempuan untuk melaksanakan pemusalaran jenazah</p> <p>Partisipasi: Kurangnya pemahaman bagi kaum perempuan untuk melakukan pemusalaran jenazah</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Masih banyaknya pemusalaran jenazah wanita yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan mahrom</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Masih adanya masyarakat terutama kaum perempuan yang belum memahami terkait pemusalaran jenazah</p>

B. PENERIMA MANFAAT	:	Masyarakat Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA		
1. METODE PELAKSANAAN	:	Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	:	Triwulan I s.d Triwulan II
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	:	Rp. 1.614.886.428,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3		Langkah 4 Isu Gender	Langkah 5	Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan	Langkah 7 Rencana Aksi	Langkah 8		Langkah 9
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal					Sebab Kesenjangan Eksternal	Database (Base-line)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		<p>bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu.</p> <p>2. Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 7 orang. Laki-laki: 3; perempuan: 4</p> <p>3. Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1</p> <p>4. Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tahun 2024, 2.606 orang. Laki-laki: 593; perempuan: 1.113 orang; disabilitas: 3 orang</p>	<p>Perguruan Tinggi</p> <p>Manfaat: Hampir sebagian besar masyarakat mencari pekerjaan masih menggunakan ijazah SMA sederajat</p>	4	5	6	7 mahasiswa berprestasi atau kurang mampu	8	9	<p>2. Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibmum linmas</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Persentase pelaksanaan Hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat</p>	

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3		Langkah 4 Isu Gender	Langkah 5	Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan		Langkah 7 Rencana Aksi	Langkah 8 Pengukuran Hasil		Langkah 9
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal			Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan		Database (Base-line)	Indikator Kinerja	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>		

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i> terkait bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu b. Pembukaan dan seleksi pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu c. Penyaluran bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan pendidikan b. Hasil penetapan penerima bantuan biaya pendidikan c. Tersalurkan nya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan prestasi Kabupaten Blitar <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tramtibmum linmas</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase pelaksanaan Hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar c. Perda No.2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Blitar 2021-2026 d. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2022 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu.
2. GAMBARAN UMUM	Jumlah ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat 7 orang. Laki-laki: 3; perempuan: 4 Jumlah Non ASN: 2. Laki-laki: 1; perempuan: 1

	<p>Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk Tahun 2024, 2.606 orang. Laki-laki: 593; perempuan: 1.113 orang; disabilitas: 3 orang</p> <p>Akses: Masih ada masyarakat Kabupaten Blitar baik laki-laki dan perempuan serta disabilitas belum semuanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan</p> <p>Partisipasi: Tidak semua masyarakat dapat menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat Perguruan Tinggi</p> <p>Kontrol: Anak-anak tergantung orang tua untuk dapat melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi</p> <p>Manfaat: Hampir sebagian besar masyarakat mencari pekerjaan masih menggunakan ijazah SMA sederajat</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Masih adanya mahasiswa/mahasiswi yang tergolong kurang mampu</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Biaya Pendidikan perguruan tinggi yang mahal</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Masyarakat Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan I s.d Triwulan IV
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp. 5.210.000.000,00

Blitar, 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
1	<p>Prioritas Dalam RPJMD/ RKPD 2025: Pengoptimalan Kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</p> <p>Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p> <p>Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan</p>	<p>2</p> <p>1. Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum</p>	<p>3</p> <p>Akses: Seringnya terjadi pelanggaran lalu-lintas</p> <p>Kontrol: Mayoritas korban kekerasan anak-anak dan wanita</p> <p>Partisipasi: Kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum</p> <p>Manfaat: Masih terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang</p>	<p>4</p> <p>Kultur masyarakat di daerah yang masih tradisional terkait peran laki-laki dan perempuan</p>	<p>5</p> <p>Minimnya peran Perempuan dalam hal fungsi dan kesadaran hukum dari lingkungan terkecil</p>	<p>Kebijakan dan Rencana Kedepan</p> <p>6</p> <p>Meningkatkan peran Perempuan dalam fungsi dan kesadaran hukum dari lingkungan terkecil</p>	<p>7</p> <p>a. Sosialisasi Lomba Kesadaran Hukum Perlindungan Anak, Narkoba dan Lalu-Lintas kepada Masyarakat di Kabupaten Biitar</p> <p>b. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Biitar</p>	<p>8</p> <p>Cakupan: Sosialisasi hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat</p> <p>Pelaksanaan kegiatan yang mendukung responsif gender.</p> <p>Keseimbangan pembagian jumlahpeserta perempuan dan laki-laki</p>	<p>9</p> <p>1. Indikator Aktifitas: a. Laporan hasil sosialisasi Lomba Hukum b. Laporan hasil Penyuluhan Hukum</p> <p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan</p>	

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3			Langkah 4 Isu Gender	Langkah 5	Langkah 6		Langkah 7	Langkah 8		Langkah 9
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal			Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi		Database (Base-line)	Indikator Kinerja	
6.	Sasaran Sub Kegiatan: Perwakilan pada masyarakat dalam daerah yang menjadi sasaran kegiatan	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 - Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. 2. Kegiatan Sosialisasi Hukum Kepada masyarakat Jumlah peserta : 500 orang/tahun (200 orang perempuan, 	3	4	5	6	7	8	9	<p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>			

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3	Langkah 4 Isu Gender		Langkah 5	Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan	Langkah 7 Rencana Aksi	Langkah 8 Pengukuran Hasil		Langkah 9
				Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal				Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	
	1	2 300 orang laki-laki Narasumber: 24 orang/tahun (10 orang perempuan, 14 orang laki-laki) Wilayah : 10 kecamatan/tahun Dari jumlah diatas dibagi menjadi 10 kali kegiatan/tahun	3	4	5	6	7	8	9		

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
SUB KEGIATAN	: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Lomba Kesadaran Hukum Perlindungan Anak, Narkoba dan Lalu-Lintas kepada Masyarakat di Kabupaten Blitar b. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Blitar
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil Sosialisasi Lomba Hukum b. Laporan hasil Penyuluhan Hukum <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi kan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 e. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Kegiatan Sosialisasi Hukum Kepada masyarakat Jumlah peserta : 500 orang/tahun (200 orang perempuan, 300 orang laki-laki) Narasumber: 24 orang/tahun (10 orang perempuan, 14 orang laki-laki) Wilayah : 10 kecamatan/tahun Dari jumlah diatas dibagi menjadi 10 kali kegiatan/tahun</p> <p>Akses: Seringnya terjadi pelanggaran lalu-lintas</p>

	<p>Kontrol: Mayoritas korban kekerasan anak-anak dan wanita</p> <p>Partisipasi: Kurangny kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum</p> <p>Manfaat: Masih terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Kultur masyarakat di daerah yang masih tradisional terkait peran laki-laki dan perempuan</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Minimnya peran Perempuan di daerah dalam hal fungsi dan kesadaran hukum</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Masyarakat Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola Tipe 1
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Triwulan 3 dan 4
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 237.312.000,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
SUB KEGIATAN	: Fasilitasi Bantuan Hukum
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Bantuan Pendampingan Hukum (Litigasi dan Pidana) bagi Masyarakat Miskin
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Jumlah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang dilaksanakan</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin d. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. e. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 79 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Kegiatan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah 12 perkara - Wilayah Kabupaten Blitar <p>Akses: Banyaknya kasus hukum di masyarakat yang terabaikan</p> <p>Kontrol: Masyarakat miskin tidak punya berdaya ketika terlibat masalah hukum</p> <p>Partisipasi: Dalam pelaksanaan bantuan hukum masih belum sinergi antara masing-masing perangkat daerah dan masyarakat terutama dalam hal kesetaraan gender</p>

	<p>Sebab Kesenjangan Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kultur masyarakat di daerah yang masih tradisional terkait peran laki-laki dan perempuan - Kurangnya informasi terkait hukum <p>Sebab Kesenjangan Eksternal:</p> <p>Tidak bisa diprediksinya perkara yang masuk</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: Masyarakat Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Januari – Desember 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 84.000.000,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8		Langkah 9
				Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	
Kebijakan / Program / Kegiatan		Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil			
1	<p>1</p> <p>Prioritas Dalam RPJMD/ RKPD 2025: Pengoptimalan Kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</p> <p>Program: Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <p>Sub Kegiatan: Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Pendataan dan Inkubasi Bisnis UMK</p>	<p>2</p> <p>1. Dasar Hukum: - Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026</p> <p>- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang</p>	<p>3</p> <p>Akses: Rekrutmen UMK penerima program pengembangan UKM yang belum menerapkan kebijakan responsif gender</p> <p>Partisipasi: Kurangnya partisipasi UMK Perempuan untuk mengikuti kegiatan inkubasi bisnis</p>	<p>4</p> <p>Persepsi bahwa laki-laki merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan Perempuan lebih baik hanya mengurus rumah tangga akibat budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat</p>	<p>5</p> <p>Belum banyak kebijakan terkait pengembangan UMK yang responsif gender</p>	<p>6</p> <p>Mendukung UMK melalui katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar melalui program <i>Strive</i> dengan menerapkan kebijakan yang responsif gender sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun Perempuan untuk mengikuti program <i>Strive</i></p>	<p>7</p> <p>Memfasilitasi UMK untuk mengikuti Program <i>Strive</i>, yaitu program yang diselenggarakan <i>n Mercy Corps</i> Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan Kesiapan UMK menggunakan saluran/tools digital, Pengembangan jaringan, pengetahuan dan keahlian,</p>	<p>8</p> <p>Target UMK 25.000 dengan minimal memiliki 1 Karyawan. 40% UMK adalah pelaku UMK Perempuan</p>	<p>9</p> <p>1. Indikator Aktifitas: Hasil Pendataan UMK serta pelaksanaan Inkubasi Bisnis</p> <p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Kebijakan perekonomian yang tersusun</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian</p>		

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Sasaran Sub Kegiatan: Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Blitar	<p>Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaa n Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>2. <i>Mercy Corps</i> Indonesia menyelenggarakan program Strive untuk mendukung UMK melalui katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui:</p> <p>a. Kesiapan UMK menggunakan saluran/ tools digital</p>					Akses kepada kredit, tabungan, sistem pembayaran, Penguatan ekosisten pendukung UMK		<p>dan Pembangunan</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
SUB KEGIATAN	: Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <p>Fasilitasi Program <i>Strive</i> yang dirancang untuk mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan UMK menggunakan saluran/ <i>tools</i> digital - Pengembangan jaringan, pengetahuan dan keahlian - Akses kepada kredit, tabungan, sistem pembayaran - Penguatan ekosisten pendukung UMK
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: Hasil Pendataan UMK serta pelaksanaan Inkubasi Bisnis</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil</p> <p>Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Kebijakan perekonomian yang tersusun</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Pertumbuhan UMK yang baik akan memperluas lapangan kerja sehingga meningkatkan angka partisipasi kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan UMK adalah melalui katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Program <i>Strive</i> merupakan program yang diselenggarakan <i>Mercy Corps</i> Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan Kesiapan UMK menggunakan saluran/ <i>tools</i> digital, Pengembangan jaringan, pengetahuan dan keahlian, Akses kepada kredit, tabungan, sistem pembayaran, Penguatan ekosisten pendukung UMK dengan target 25.000 UMK Kabupaten Blitar dan 40% nya adalah UMK perempuan.</p>

B. PENERIMA MANFAAT	:	Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA		
1. METODE PELAKSANAAN	:	Swakelola Tipe 1
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	:	Januari – Desember 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	:	Rp 28.127.000,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3			Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
			Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub kegiatan	Rencana Aksi					
1	<p>Prioritas Dalam RPJMD/ RKPD 2025: Pengoptimalan Kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas</p> <p>Program: Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</p> <p>Tujuan Sub Kegiatan: Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah</p>	<p>2</p> <p>1. Dasar Hukum: - Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 - SE Bupati Blitar No. 510/025/409.1.4/2023 tentang Sinergitas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar yang meliputi Perumda Air Tirta Minum Penataran, PT BPR Penataran, dan Perumda Penataran Aneka Usaha.</p> <p>Partisipasi: Karyawan Badan Usaha Milik Daerah perempuan jarang dilibatkan untuk mewujudkan</p>	3	4	5	6	7	8	9			
			<p>Akses: Kegiatan Gathering karyawan dalam rangka mewujudkan sinergitas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar yang meliputi Perumda Air Tirta Minum Penataran, PT BPR Penataran, dan Perumda Penataran Aneka Usaha.</p>	<p>4</p> <p>Kurangnya komunikasi karyawan antar BUMD sehingga kesulitan menjalin kerjasama.</p>	<p>5</p> <p>Masih kurangnya sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah, dikarenakan selama ini masing-masing terbiasa bekerja sendiri</p>	<p>6</p> <p>Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan Gathering bagi seluruh karyawan BUMD. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antar BUMD.</p>	<p>7</p> <p>a. Kegiatan gathering semua karyawan BUMD laki-laki maupun perempuan b. Membangun Kerjasama antar BUMD</p>	<p>8</p> <p>Jumlah BUMD di Kabupaten Blitar = 3 BUMD</p>	<p>9</p> <p>1. Indikator Aktifitas: a. Keterlibatan seluruh karyawan BUMD dalam kegiatan b. Penanda tangenan Kerjasama antar BUMD</p> <p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</p>			

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
				Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Sub kegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	<p>Sasaran Sub Kegiatan: Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar yang meliputi Perumda Air Minum Tirta Penataran, PT BPR Penataran Kabupaten Blitar, dan Perumda Penataran Aneka Usaha.</p>	<p>sinergitas. Dengan kata lain, ketiga BUMD tersebut berjalan masing-masing. Selanjutnya pada Tahun 2022 mulai diadakan agenda gathering untuk seluruh karyawan yang didalamnya juga dilaksanakan kegiatan pembahasan/ penandatanganan kerjasama untuk mewujudkan sinergi antar BUMD. - Jumlah BUMD: 3 BUMD - Jumlah Peserta: 133 Orang</p>	<p>kegiatan di luar perusahaan dibandingkan laki-laki.</p>	4	5	6	7	8	9
									<p>3. Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Kebijakan perekonomian yang tersusun</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>5. Indikator Sasaran Peringkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

GENDER ACTION BUDGET (GBS)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
SUB KEGIATAN	: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
KINERJA RESPONSIF GENDER	: Gathering karyawan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sinergitas antar BUMD. Seluruh karyawan tanpa memperhatikan gender tertentu dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas: a. Keterlibatan seluruh karyawan BUMD dalam kegiatan b. Penanda tangan Kerjasama antar BUMD</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</p> <p>Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Kebijakan perekonomian yang tersusun</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p> <p>Akses: Kegiatan Gathering karyawan dalam rangka mewujudkan sinergitas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar yang meliputi Perumda Air Minum Tirta Penataran, PT BPR Penataran, dan Perumda Penataran Aneka Usaha.</p> <p>Partisipasi: Karyawan Badan Usaha Milik Daerah perempuan jarang dilibatkan untuk mengikuti kegiatan di luar perusahaan dibandingkan laki-laki.</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Kurangnya komunikasi karyawan antar BUMD sehingga kesulitan menjalin kerjasama</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Masih kurangnya sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah, dikarenakan selama ini masing-masing terbiasa bekerja sendiri</p>

A. LATAR BELAKANG		
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 b. SE Bupati Blitar No. 510/025/409.1.4/2023 tentang Sinergitas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar Tanggal 28 Februari 2023
2. GAMBARAN UMUM	:	<p>Dalam rangka memaksimalkan potensi dan eksistensi Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya mendukung perekonomian Kabupaten Blitar, perlu dilaksanakan sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar yang meliputi Perumda Air Minum Tirta Penataran, Perumda Penataran Anek Usaha, dan PT BPR Hambangun Artha Selaras. Salah satu upaya mewujudkan sinergi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan gathering seluruh karyawan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar. Dengan demikian diharapkan antar Badan Usaha Milik Daerah dapat membina kerjasama dengan baik sehingga mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang maju dan berdaya saing.</p>
B. PENERIMA MANFAAT	:	Seluruh karyawan Badan Usaha Milik Daerah
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA		
1. METODE PELAKSANAAN	:	Swakelola Tipe 1
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	:	November 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	:	Rp 303.149.500,00

Blitar, 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3		Langkah 4		Langkah 5	Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan	Langkah 7 Rencana Aksi	Langkah 8 Database (Base-line)	Langkah 9 Indikator Kinerja		
			Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal						Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Pengukuran Hasil
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Prioritas Dalam RPJMD/ RKPD 2025: Pencapaian Kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	1. Dasar Hukum: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah - Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026. - Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang	Akses: Personel JF-PPBJ yang ditugaskan untuk pemenuhan peningkatan kompetensi diluar daerah lebih banyak adalah personel JF-PPBJ laki-laki	1. Terbatasnya jangkauan dalam melaksanakan tugas pemenuhan kompetensi bagi JF-PPBJ perempuan dikarenakan 6 dari 8 perempuan personel BPBJ memiliki anak balita dan masih menyusui.	6 dari 8 perempuan personel BPBJ memiliki anak balita dan masih menyusui.	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	a. Bimbingan Teknis terkait tugas pokok dan fungsi PBJ agar meningkatkan kompetensi SDM PBJ pada tingkatan sama	1. Pembentukan tim pendamping dari staf PBJ dengan memperhitungkan jumlah personil sehingga dalam satu tim dapat seimbang dan memiliki tupoksi yang sama	1. Indikator Aktifitas: a. ASN perempuan dan laki-laki di BPBJ mengikuti Bimtek untuk peningkatan kompetensi				
2.	Program: Perekonomian dan pembangunan												
3.	Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
4.	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
5.	Tujuan Sub Kegiatan: Pendampingan dan advokasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, baik bagi OPD/SKPD atau penyedia.												
			Partisipasi: Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak	2. Terbatasnya jangkauan personel JF PPBJ perempuan dalam melaksanakan penugasan pendampingan dan fasilitasi OPD untuk OPD yang berlokasi jauh.			b. Mengundang narasumber untuk pendampingan bagi Fungsional PBJ	1. Pelaksnaan pendampingan terhadap OPD/SKPD dalam pelaksanaan proses pengadaan pada semua tahapan	b. ASN di bagian Pengadaan Barang dan jasa mendapatkan pendampingan narasumber yang berkompeten				
									c. Melaksanakan pendampingan pada OPD terkait dengan pengadaan secara <i>on-line</i>	2. Pelaksanaan pendampingan terhadap OPD/SKPD dalam pelaksanaan proses pengadaan pada semua tahapan	c. OPD melaksanakan pengadaan secara <i>on-line</i>		

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan barang/jasa di OPD/SKPD sudah proporsional jika dibandingkan Jumlah personil BPBJ (11 laki-laki dan 8 perempuan)							5. Indikator Sasaran Peringkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Program Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SUB KEGIATAN	: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan Teknis terkait tugas pokok dan fungsi PBJ agar meningkatkan kompetensi SDM PBJ pada tingkatan sama b. Mengundang narasumber untuk pendamping an bagi Fungsional PBJ c. Melaksanakan pendampingan pada OPD terkait dengan pengadaan secara <i>on-line</i>
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN perempuan dan laki-laki di BPBJ mengikuti Bimtek untuk peningkatan kompetensi b. ASN di bagian Pengadaan Barang dan jasa mendapatkan pendamping an narasumber yang berkompeten c. OPD melaksana- kan pengadaan secara <i>on-line</i> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 90 orang</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase tingkat pengelolaan pengadaan barang dan jasa 100%</p> <p>Indikator Program: Meningkatkan kinerja kegiatan pada Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah b. Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026. c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Fasilitasi dan pendampingan terhadap OPD/SKPD atau penyedia</p> <p>Pembinaan terhadap staff PBJ dalam meningkatkan kapasitas SDM PBJ</p> <p>Jumlah karyawan total 19 Dengan rincian: Laki-laki = 11 Perempuan = 8</p>

	<p>Persentase perempuan yang ditugaskan dalam pendampingan pengadaan barang/jasa di OPD/SKPD sudah proporsional jika dibandingkan Jumlah personil BPBJ (11 laki-laki dan 8 perempuan)</p> <p>Akses: Tugas utama dalam melaksanakan tujuan organisasi dilakukan secara bersama baik personil Laki-laki ataupun perempuan dalam satu kegiatan sehingga memunculkan manfaat bagi seluruh elemen tanpa adanya perbedaan jenis kelamin</p> <p>Partisipasi: Jumlah Laki-laki lebih banyak sehingga tugas kegiatan pendampingan dan fasilitasi OPD/SKPD lebih banyak peran laki-laki.</p> <p>Kontrol: Dalam Proses Peningkatan Kompetensi SDM PBJ Wanita lebih teliti dan turut aktif terkait kegiatan BIMTEK materi PBJ</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: - Terbatasnya jangkauan dalam melaksanakan tugas pemenuhan kompetensi bagi JF-PPBJ perempuan dikarenakan 6 dari 8 perempuan personel BPBJ memiliki anak balita dan masih menyusui. - Terbatasnya jangkauan personel JF PPBJ perempuan dalam melaksanakan penugasan pendampingan dan fasilitasi OPD untuk OPD yang berlokasi jauh.</p> <p>Sebab Penyebab Eksternal: 6 dari 8 perempuan personel BPBJ memiliki anak balita dan masih menyusui.</p>
<p>B. PENERIMA MANFAAT</p>	<p>: ASN di Bagian PBJ atau UKPBJ Kab Blitar, PPK serta Pelaku Pengadaan</p>
<p>C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA</p>	
<p>1. METODE PELAKSANAAN</p>	<p>: Swakelola Tipe 1</p>
<p>2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN</p>	<p>: Januari – Desember 2025</p>
<p>3. BIAYA YANG DI PERLUKAN</p>	<p>: Rp. 460.601.400,00</p>

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Program Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa dengan bersinergi bersama OPD b. Membantu OPD dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa c. Pendampingan kepada Pokja Pemilihan dalam proses pengadaan barang dan jasa
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersusunnya dokumen Dokumentasi inventarisasi paket pengadaan yang responsive gender b. Hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa c. Tersedianya fasilitas zoom meeting <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase tingkat pengelolaan pengadaan barang dan jasa</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah b. Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab Blitar Tahun 2021-2026. c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
2. GAMBARAN UMUM	: <p>Pentingnya melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;</p> <p>Jumlah personel Bagian PBJ total 19 dengan rincian: Laki-laki = 11 Perempuan = 8</p> <p>Akses: Kurang optimalnya dalam pembagian Tim pemilihan penyedia</p> <p>Partisipasi: Pemahaman dari SDM PBJ masih belum sama terkait poses pengadaan</p>

	<p>Kontrol: Beban kerja Fungsional PBJ yang tidak sama</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Kurang optimalnya dalam pembagian Tim pemilihan penyedia</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: Kurang pahamnya OPD terkait dalam memberikan data inventarisasi paket pengadaan</p>
B. PENERIMA MANFAAT	: ASN di Bagian PBJ atau UKPBJ Kabupaten Blitar Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA	
1. METODE PELAKSANAAN	: Swakelola Tipe 1
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	: Dilaksanakan pada triwulan III dan I
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	: Rp 262.189.040,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Pengukuran Hasil Indikator Kinerja
6.	<p>Sasaran Sub Kegiatan:</p> <p>1. Pembangunan Fisik yang ada di Kabupaten Blitar Umumnya dan Proyek Strategis Daerah Khususnya</p> <p>2. Semua OPD yang ada di Kabupaten Blitar</p>	2	<p>3</p> <p>Manfaat: Tugas Pokok dan Fungsi saling berkaitan</p>	4	5	6	7	8	9
							<p>d. Membuat WA Notif sebagai informasi yang langsung memuat kendala dan permasalahan yang dihadapi di OPD terkait Progres Pembangunan</p>		<p>3. Indikator Kegiatan: Terfasilitasinya kegiatan administrasi pembangunan</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Perencanaan dan Pembangunan</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Program Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> a. Bimtek Aplikasi E kenda (Elektronik Kendali Daerah) untuk ASN dan Non ASN yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan b. Sosialisasi Aplikasi E-kenda (Elektronik Kendali Daerah) bagi OPD yang mempunyai kegiatan Pembangunan Fisik di Kabupaten Blitar c. Bimtek Aplikasi E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah) bagi PPK, Pengawas, dan Admin pada OPD di Kabupaten Blitar d. Membuat WA Notif sebagai informasi yang langsung memuat kendala dan permasalahan yang dihadapi di OPD terkait Progres Pembangunan
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen hasil Bimtek Internal Bagian Administrasi Pembangunan b. Dokumen hasil Sosialisasi OPD c. Dokumen hasil Bimtek OPD d. Tersedianya WA notif <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Indikator Kegiatan: Terfasilitasinya kegiatan administrasi pembangunan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. UU no 25 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan b. UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. GAMBARAN UMUM	: Melihat riil yang ada dilapangan ASN yang terjun langsung dalam memonitoring dan mengawasi Pembangunan Fisik yang ada di Kabupaten Blitar mayoritas dari laki-laki
B. PENERIMA MANFAAT	: Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA		
1. METODE PELAKSANAAN	:	Swakelola
2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN	:	Januari – Desember 2025
3. BIAYA YANG DI PERLUKAN	:	Rp 242.491.032,00

Blitar, 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

No.	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Kedepan Reformulasi Tujuan Subkegiatan	Rencana Aksi	Database (Base-line)	Indikator Kinerja
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bitar</p> <p>2. Dalam Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) kebanyakan hanya ASN dan Non ASN yang berpengalaman dibidang Teknik saja yang ikut serta dalam penyusunan.</p>	<p>bukan di bidang Teknik sehingga kurang menguasai dalam hal Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik)</p>				<p>d. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) kepada seluruh Perangkat Daerah</p>		<p>2. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan</p> <p>3. Indikator Kegiatan: Persentase pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</p> <p>4. Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>5. Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey</p>

No.	Langkah 1 Kebijakan / Program / Kegiatan	Langkah 2 Data Pembuka Wawasan	Langkah 3	Langkah 4 Isu Gender		Langkah 5	Langkah 6 Kebijakan dan Rencana Kedepan	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
				Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		3. 2 orang ASN laki-laki dan perempuan telah mengikuti Bimtek penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik)								Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
SUB KEGIATAN TA. 2025	
PERANGKAT DAERAH	: Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
PROGRAM	: Program Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
SUB KEGIATAN	: Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
KINERJA RESPONSIF GENDER	: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendatangkan Narasumber/Tenaga Ahli yang kompeten untuk mendampingi Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) b. Bimtek Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) untuk ASN dan Non ASN Bagian Administrasi Pembangunan c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) d. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) kepada seluruh Perangkat Daerah
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	: <p>Indikator Aktifitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) b. Laporan hasil pelaksanaan Bimtek Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) c. Terbitnya Peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) d. Laporan hasil Sosialisasi Peraturan Bupati tentang HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan</p> <p>Indikator Kegiatan: Persentase pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Indikator Program: Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Nilai SAKIP dan Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (IKM)</p>
A. LATAR BELAKANG	
1. DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

<p>2. GAMBARAN UMUM</p>	<p>: Dalam Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) kebanyakan hanya ASN dan Non ASN yang berpengalaman dibidang Teknik saja yang ikut serta dalam penyusunan.</p> <p>Akses: Kurangnya keahlian dan pengalaman di dalam Bidang Teknik yang dimiliki ASN dan Non ASN di Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>Partisipasi: Kurangnya Peran ASN dan Non ASN Bagian Administrasi Pembangunan dalam penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik)</p> <p>Kontrol: Latar belakang Pendidikan ASN dan Non ASN di Bagian Perencanaan dan Keuangan bukan di bidang Teknik sehingga kurang menguasai dalam hal Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik)</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal: Terbatasnya ASN dan Non ASN yang memiliki kemampuan dalam Bidang Teknik</p> <p>Sebab Kesenjangan Eksternal: - Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik) lebih banyak dilakukan orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang Teknik Sipil - Orang yang memiliki kemampuan dalam Bidang Teknik lebih banyak diberikan posisi dalam Penyusunan HSPK dan ASB (Fisik dan Non Fisik)</p>
<p>B. PENERIMA MANFAAT</p>	<p>: Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar</p>
<p>C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA</p>	
<p>1. METODE PELAKSANAAN</p>	<p>: Swakelola</p>
<p>2. TAHAP WAKTU PELAKSANAAN</p>	<p>: Januari – Desember 2025</p>
<p>3. BIAYA YANG DI PERLUKAN</p>	<p>: Rp 389.208.968,00</p>

Blitar, 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002